

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD KOTA SALATIGA



TERHADAP
RANPERDA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
APRIL 2023

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
TERHADAP
RANPERDA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua

Yth Penjabat Walikota Salatiga;

Ykh Jajaran Forkompinda Kota Salatiga;

Ykh Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Salatiga;

Ykh Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kota Salatiga;

Ykh Para Asisten Sekda dan Staf Ahli Walikota;

Ykh Seluruh Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota
Salatiga;

Ykh Para Hadirin dan Tamu Undangan yang berbahagia.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya sehingga dalam kesempatan ini kita dapat menghadiri dan mendengarkan Pandangan Umum Fraksi – Fraksi dalam mencermati terhadap RANPERDA Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sidang Paripurna yang terhormat

Dengan disampaikannya Raperda atas inisiatif Walikota, Fraksi PKS mendorong agar Raperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bisa ditindaklanjuti sebagaimana berikut:

Perda ini diharapkan:

- 1) bahwa dengan adanya Raperda ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Salatiga dalam melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembinaan kemasyarakatan di daerah, dibutuhkan ketersediaan beberapa sumber daya, salah satunya sumber daya keuangan. Sumber daya keuangan yang cukup vital bagi daerah yaitu dengan melakukan pungutan kepada orang atau badan hukum, baik berupa pajak daerah atau retribusi daerah.
- 2) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.
- 3) Dengan adanya Raperda ini masyarakat ikut berkontribusi kepada daerah sehingga pembangunan di daerah bisa berjalan dan penggunaan dari pajak ini

dapat secara langsung digunakan untuk keperluan daerah demi kemakmuran rakyat.

- 4) Kami Fraksi PKS meminta agar dalam pengelolaan pajak betul-betul dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk pembangunan yang tepat dan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran. Perlu juga menjadi perhatian bersama bahwa pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak untuk dikelola dengan amanah jangan sampai muncul gerakan anti pajak karena ulah dari oknum penyelenggara keuangan negara yang tidak bertanggungjawab.

Sidang Paripurna yang terhormat

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Kota Salatiga terhadap Raperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk selanjutnya kami FPKS meminta agar Raperda ini untuk bisa dijadikan Perda. Apabila dalam penyampaian Pandangan Umum ini ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salatiga, 13 April 2023

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DPRD KOTA SALATIGA

1. Budi Santosa, SE, MM (Ketua)



2. Nono Rohana, S.Ag (Sekretaris)



3. Latif Nahari, ST (Anggota)

4. Heru Prastyo, SE, ME (Anggota)

